

CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BEI)

Sari Kurniati¹⁾

¹Universitas Islam Batik Surakarta
Arikade2003@gmail.com

Abstract

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia launched a law on Tax Amnesty in 2016. Tax Amnesty Act gives the private or corporate taxpayers that doing tax avoidance a fine and penalty annulment. The Tax Amnesty Act that got a positive response from the private or corporate taxpayers shows that many the private or corporate taxpayers in Indonesia are doing tax avoidance. Corporate governance are some factors that affecting tax avoidance practice of taxpayers in Indonesia, especially the corporate taxpayer. The research examines the effect of corporate governance toward tax avoidance of corporate taxpayer in Indonesia. This study uses a sample of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2019. 204 companies were sampled in this study. This research found that variable Foreign and competency of Independent Commissioner Boards gives effect on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Governance, Tax Avoidance*

Abstrak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan undang-undang tentang Pengampunan Pajak pada tahun 2016. Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan pembatalan denda dan sanksi kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang Pengampunan Pajak ini mendapat respon positif dari wajib pajak orang pribadi atau badan menunjukkan bahwa banyak wajib pajak orang pribadi atau badan di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak wajib pajak di Indonesia, khususnya wajib pajak badan. Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak wajib pajak badan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. 204 perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Asing (*foreign*) dan kompetensi Dewan Komisaris Independen (*competency of Independent Commissioner*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan, Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan untuk dari sisi wajib pajak merupakan beban yang wajib untuk dikeluarkan atas penghasilannya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang luas jika dilihat dari geografisnya dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar serta pertumbuhan perusahaan yang dinamis. Perkembangan perusahaan yang dinamis di Indonesia diantaranya adalah perusahaan di sektor manufaktur. Berkembangnya perusahaan manufaktur di Indonesia menyebabkan roda perekonomian bergerak cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan serta termasuk salah satu penyumbang penghasilan pajak ke kas negara. Namun tidak menutup kemungkinan jika perusahaan di sektor manufaktur tidak selayaknya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena diturunkannya kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 dan program-program pengampunan pajak dari tahun ke tahun (hingga tahun 2021) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendapat respon yang cukup luar biasa oleh masyarakat Indonesia, baik itu wajib pajak badan maupun pribadi. Termasuk wajib pajak dari sektor manufaktur turut serta dalam program kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Hal tersebut dapat mengindikasikan perilaku penghindaran pajak di masa lalu oleh wajib pajak.

Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik *tax planning* yang dapat diterima dengan *tax avoidance* yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi (Ibnu Wijaya, 2014: 3).

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Konsep *corporate governance* mengandung aturan yang akan menghasilkan kepercayaan antara pemilik (*principal*) dan manajemen, yang pada akhirnya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan yang dilakukan pihak manajemen. Dalam penelitian ini struktur *corporate governance* yang digunakan adalah investor asing, investor institusional, komisaris independen dan kompetensinya dalam bidang keuangan, komite audit dan kompetensinya dalam bidang keuangan penelitian.

Untuk mengukur *tax avoidance* yang mudah dimengerti, penelitian ini menggunakan ukuran *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR* atau *CETR*)

perusahaan, yaitu kas atas pajak dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge et, al. 2010).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Salihu et.al (2014), Kapil dan Mishra (2019) serta Konvermann (2019) yang menunjukkan pengaruh kepemilikan saham, faktor *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *Leverage*, *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan untuk meminimalisir faktor-faktor dari luar. Perusahaan manufaktur masih terdapat indikasi konflik antara pemegang saham utama dan manajemen perusahaan dalam penentuan kebijakan yang terkait besaran *effective tax rate* (ETR) atau terdapat praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, bidang penelitian ini masih merupakan masalah yang menarik untuk diteliti.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Agency Theory

Anthony dan Govindarajan (2009: 269) menyatakan teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif memotivasi individu-individu (prinsipal dan agen) untuk mencapai keselarasan tujuan. Konsep dari hubungan agensi ini, ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Begitu juga dengan definisi dari Jensen dan Meckling (1976: 5), bahwa hubungan agensi sebagai hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan.

Bila digambarkan pada suatu perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan eksekutif/CEO adalah agen. Di sini, pemegang saham menyewa/membayar CEO untuk mengelola perusahaannya dan mengharapkan CEO akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Prinsipal berupaya sedemikian rupa agar agen bekerja produktif seperti halnya bila agen tersebut adalah pemilik perusahaan.

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Disini pemegang saham hanya menginginkan pengembalian keuangan atas investasi tidak berpikir mengenai pajak yang dibayar, di sisi lain manajemen berupaya meningkatkan profitabilitas atau kinerja perusahaan tetapi mengharapkan ada kompensasi lebih dari peningkatan profitabilitas tersebut, mungkin dengan cara mengurangi pajak yang dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak atau bahkan penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Brown, 2012 dalam Ibnu Wijaya (2014: 1) adalah:

“arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law”.

Untuk memperjelas, *tax avoidance* umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan *tax avoidance* dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Untuk mengukur *tax avoidance* yang mudah dimengerti, penelitian ini menggunakan ukuran standar, yaitu ukuran adalah kas tarif pajak efektif atau *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR atau CETR) perusahaan, yaitu kas atas pajak dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (dengan menyesuaikan *extraordinary item* atau pos luar biasa).

Konsep Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penelitian Desai dan Dharmapala (2016) yang menyebutkan tentang pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Dalam penelitiannya menemukan bahwa hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan *tax avoidance* bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah.

Penelitian Desai dan Dharmapala (2007), Andrianto dan Marfiana (2021) menyebutkan bahwa sistem *Corporate Governance* mempengaruhi tingkat pendapatan pajak dan sensitivitas penerimaan pajak terhadap perubahan pajak. Ketika sistem *corporate governance* tidak efektif atau mudah untuk menunda pendapatan, peningkatan tarif pajak dapat mengurangi pendapatan pajak.

Kepemilikan Saham Terhadap Tax Avoidance

Penelitian Salihu et, al. (2014), Kapil dan Mishra (2019), Andrianto dan Marfiana (2021) menemukan bahwa berdasarkan biaya/manfaat pertimbangan *tax avoidance*, bahwa kepemilikan keluarga; kepemilikan asing dan kepemilikan

pemerintah dapat dikaitkan dengan *tax avoidance* dan menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensi *tax avoidance* perusahaan dengan potensi efek interaktif dari komposisi dewan komisaris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensi *tax avoidance* perusahaan dengan potensi efek interaktif dari komposisi dewan komisaris.

Proksi kepemilikan saham asing diukur dari prosentase kepemilikan saham oleh perusahaan dan individu asing.

H1.a : Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Jensen dan Meckling (1976: 67), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1986: 470) menunjukkan bahwa *larger shareholders* (pemegang saham pengendali) dapat lebih banyak melakukan monitoring terhadap pihak manajemen perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar investasi dalam perusahaan semakin besar pengaruhnya dalam pengawasan kinerja manajemen. Semakin besar porsi kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajemen, secara otomatis mengurangi konflik kepentingan antar manajemen. Proksi kepemilikan saham institusi diukur dari prosentase kepemilikan saham institusi Indonesia dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:

H1.b: Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen dan Kompetensinya Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang

saham Pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Amstrong, et. al., 2014 menemukan bukti bahwa kecanggihan sistem keuangan dan komisaris independen berhubungan dengan menurun atau meningkatnya motivasi *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka tingkat independensi juga semakin tinggi sehingga semakin kecil pengaruh dari pemegang saham pengendali, sehingga motivasi untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Demikian pula sebaliknya Semakin sedikit jumlah komisaris independen, maka tingkat independensi juga rendah sehingga bisa besar pengaruh dari pemegang saham pengendali, sehingga motivasi untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi. Proksi Komisaris Independen diukur dari jumlah komisaris independen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:

H2.a: Jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Namun menurut peneliti, jumlah dari dewan komisaris saja tidak cukup agar terhindar dari perilaku *tax avoidance*, kompetensi mengenai bidang keuangan dan pajak dari semua atau salah satu dewan komisaris independen sangatlah diperlukan. Karena pengetahuan mengenai peraturan perpajakan akan lebih detail dalam pengawasan keuangan serta mengetahui bila terjadi kecurangan dalam perpajakan perusahaan tersebut.

Kinerja dewan komisaris independen dalam memberikan nasehat dan pengawasan kepada manajemen perusahaan sangat terkait dengan kemampuan dan keandalan masing-masing anggota dewan komisaris independen itu sendiri. Keragaman latar belakang, keahlian, pengalaman dan pendidikan dipercaya dapat memberikan nilai tambah berupa keragaman informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Namun di sisi lain, keragaman tersebut juga dapat menyebabkan permasalahan komunikasi dan kesulitan dalam pengambilan keputusan.

Proksi kompetensi dewan komisaris independen terhadap bidang keuangan dan pajak (*expert_KI*) diukur dari prosentase jumlah komisaris independen yang berkompeten di bidang keuangan dan pajak dibandingkan seluruh jumlah komisaris independen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:

H2.b: Kompetensi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit dan Kompetensinya

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006) mengenai Komite Audit adalah:

“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”

Pedoman *good corporate governance* berdasarkan KNKG (2006), komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk memastikan (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) Struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik, (3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, (4) Tindak lanjut hasil temuan audit dilaksanakan oleh manajemen. Sedangkan terkait jumlah komite audit, ditetapkan jumlah komite audit sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan negara, perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau profesi dari luar perusahaan. Salah satu anggota memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Penelitian Swingly et. al, 2015 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Proksi komite audit diukur dari jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan. Menurut peneliti perlu menambahkan variabel prosentase komite audit yang kompeten pada keuangan dan pajak yang diukur dari jumlah komite audit yang berkompeten di bidang keuangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan komite audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu:

H3.a: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap motivasi *tax avoidance*.

H3.b: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap motivasi *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pada akhir tahun yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dengan kriteria pengambilan sampling, adalah perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai 2019, periode laporan keuangan yang berakhir 31 Desember, dengan mata uang Rupiah, dan mempunyai laba bersih sebelum pajak bernilai positif berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Setelah dilakukan analisis dari kriteria sampel dan *outlier* data, maka sampel yang digunakan sebanyak 204 data perusahaan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Asing diukur dari prosentase porsi saham asing dibandingkan dengan jumlah seluruh jumlah saham. Kepemilikan Institusi diukur dari prosentase porsi saham institusi dibandingkan dengan jumlah seluruh jumlah saham. Komisaris Independen (KI), diukur dari prosentase jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah seluruh komisaris. Kompetensi komisaris independen (*Expert_KI*), diukur dari prosentase jumlah komisaris independen yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh komisaris independen. Komite audit (KA), diukur dari jumlah seluruh komite audit. Kompetensi komite audit (*Expert_KA*), diukur dari prosentase jumlah komite audit yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh komite audit. *Leverage* (LEV) menekankan pada peranan penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan prosentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Semakin besar rasio ini semakin besar biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak. ROA juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam hal pengembalian aset yang dimiliki berdasarkan kemampuan laba perusahaan. ROA sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini, *Tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Cash ETR*, yaitu Biaya Pajak Terkini dibagi dengan Laba Sebelum Pajak. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{Foreign} + \beta_2 \text{Ins_B} + \beta_3 \text{KI} + \beta_4 \text{Expert_KI} + \beta_5 \text{KA} + \beta_6 \text{Expert_KA} + \beta_7 \text{Lev} + \beta_8 \text{ROA} + \varepsilon$$

Keterangan:

CETR	= <i>Cash Effective Tax Rate</i>
<i>Foreign</i>	= prosentase pemegang saham asing
<i>Ins-B</i>	= prosentase pemegang saham institusional
KI	= prosentase komisaris independen
<i>Expert_KI</i>	= prosentase komisaris independen yang kompeten dalam bidang keuangan
KA	= jumlah seluruh komite audit
<i>Expert_KI</i>	= prosentase komite audit yang kompeten dalam bidang Keuangan
LEV	= rasio total hutang terhadap total asset
ROA	= rasio laba bersih sebelum pajak terhadap total asset
<i>Capint</i>	= rasio asset tetap bruto terhadap total asset

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan diantaranya: (1) menguji normalitas data dengan melakukan *one sample Kolmogorov Smirnov*, (2) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, (3) menguji multikolinearitas dengan melihat tolerance value dan *variance inflation factor* (VIF), (4) menguji autokorelasi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*.

Pengujian hipotesis ini dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan antara lain uji koefisien simultan atau uji model (uji F) dan pengujian signifikan parameter individual (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Dalam deskripsi data ini akan dijelaskan mengenai populasi data, jumlah sampel, dan prosentase masing-masing sampel yang digunakan dan analisis deskriptif dari data yang telah diolah. Dari analisis sampel, akhirnya penelitian ini menggunakan 204 sampel data.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini, untuk mengetahui nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dan mengetahui seberapa besar keakuratan data dan penyimpangan pada data tersebut. Perhitungan statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel Statistik Dekriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	204	.01	.56	.2553	.11482
FOREGN	204	.00	.99	.4065	.31634
Institusi_B	204	.00	1.00	.7586	.17931
KI	204	.20	1.00	.4074	.14117
Ekpert_KI	204	.00	1.00	.4938	.40212
KA	204	2.00	5.00	3.0980	.40949
Ekspert_KA	204	.25	1.00	.6978	.25041
LEV	204	.05	8.39	.5113	.68175
ROA	204	-.04	.41	.1132	.09244
Valid N (listwise)	204				

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan tingkat *cash effective tax rate* bila dihitung dengan statistik rata-rata 25,53% dengan sampel sebanyak 204 data perusahaan. Dari variabel independen rata-rata tertinggi tingkat *cash effective tax rate* ditunjukkan pada variabel Komite Audit dengan rata-rata 309,8% dengan asumsi bahwa komite audit paling mampu mempengaruhi besaran pajak yang dibayar.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah model regresi linier yang digunakan terdapat korelasi antara kesalahan tahun t dengan kesalahan tahun $t-1$. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*).

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,875 ^a

a. Predictors: (Constant), ROA, Ekpert_KI, KI, LEV, KA, FOREIGN, Institusi_B, Ekspert_KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah

Agar syarat uji auto korelasi terpenuhi, maka nilai DW harus diantara du dan 4-du yang merupakan daerah bebas autokorelasi, dengan jumlah variabel independen, $k = 6$ dan $n = 204$ pada $\alpha = 0,05$ diperoleh dari tabel Durbin-Watson bahwa nilai $dl = 1,1707$ dan $du = 1,831$ sehingga $4-du = 2,169$. Dengan demikian $du 1,831 < DW 1,875 < 4-du 2,169$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas ditentukan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut tabel uji multikolinearitas:

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	FOREGN	,776	1,288
	Institusi_B	,633	1,579
	KI	,951	1,052
	Ekpert_KI	,695	1,439
	KA	,919	1,088
	Ekspert_KA	,592	1,689
	LEV	,904	1,106
	ROA	,822	1,217

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa, *Tolerance* variabel bebas $> 0,1$ yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 10%. Hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel bebas < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser.

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,132	,049		2,680	,008
FOREGN	,007	,015	,036	,463	,644
Institusi_B	,007	,030	,019	,223	,824
1 KI	-,022	,031	-,049	-,695	,488
Ekpert_KI	-,023	,013	-,151	-1,821	,070
KA	-,015	,011	-,102	-1,413	,159
Ekspert_KA	,033	,022	,134	1,490	,138
LEV	,003	,007	,032	,446	,656
ROA	-,101	,051	-,150	-1,958	,052

a. Dependent Variable:
abs_res

Sumber: Data Sekunder Diolah

Nilai signifikan pada tabel 4.4 model di atas menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi variabel independen yang kurang dari 0,05 maka dalam hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji statistik yang data digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		204
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,10570406
	Absolute	,068
Most Extreme Differences	Positive	,068
	Negative	-,033
Kolmogorov-Smirnov Z		,971
Asymp. Sig. (2-tailed)		,303

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah

Untuk memenuhi syarat hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi harus di atas 0,05, maka data residual akan terdistribusi normal. Dari tabel di atas hasil Kolmogorov-Smirnov adalah 0,971 dan signifikan pada 0,303, maka asumsi normalitas terpenuhi

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	(Constant)	,190	,087		
	Foreign	,078	,027	,214	2,858
	Institusi_B	,065	,053	,101	1,223
	KI	,054	,055	,067	,990
1	Ekspert_KI	,043	,023	,150	1,902
	KA	-,005	,019	-,019	-,276
	Ekspert_KA	-,033	,039	-,071	-,830
	LEV	-,032	,012	-,192	-,276
	ROA	-,025	,090	-,020	-,276

a. Dependent Variable: CETR

*Signifikan pada α 5%

** Signifikan pada α 10%

Sumber: Data sekunder diolah

Nilai yang dilihat dalam analisis regresi berganda yaitu angka yang terdapat pada *unstandardized coefficients* (B). Persamaan regresi dapat diperoleh dari tabel 4.6 di atas, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$\text{CETR} = 0,190 + 0,078 \beta_1 \text{Foreign} + 0,065 \beta_2 \text{Ins}_B + 0,054 \beta_3 \text{KI} + 0,43 \beta_4 \text{Expert_KI} - 0,005 \beta_5 \text{KA} - 0,33 \beta_6 \text{Expert_KA} - 0,32 \beta_7 \text{Lev} - 0,025 \beta_{15} \text{ROA} + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapat persamaan dengan beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Variabel kepemilikan saham asing bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham asing mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.
- b. Variabel kepemilikan saham institusional bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.
- c. Variabel jumlah komisaris independen bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.
- d. Variabel kompetensi komisaris independen bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.
- e. Variabel jumlah komite audit bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.
- f. Variabel kompetensi komite audit bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel terikat (dependen) yaitu tingkat *Cash Effective Tax Rate*.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut tabel dari koefisien determinasi:

Tabel Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,391 ^a	,153	,118	,10785

a. Predictors: (Constant), ROA, Ekpert_KI, KI, LEV, KA, FOREIGN, Institusi_B, Ekspert_KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel koefisien determinasi atas nilai Adjusted R Square sebesar 0,118. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 11,8% terhadap perubahan variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan tingkat *cash effective tax rate*. Dapat pula dikatakan bahwa 11,8% tingkat *cash effective tax rate* mampu dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 88,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit* atau sudah baik atau mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Uji Statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,408	8	,051	4,388	,000 ^b
	Residual	2,268	195	,012		
	Total	2,676	203			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), ROA, Ekpert_KI, KI, LEV, KA, FOREGN, Institusi_B, Ekspert_KA

Pada tabel diatas menunjukkan probabilitas value 0,000 yaitu angka yang berada dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu model regresi yang digunakan sudah *fit* atau baik dan variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat *cash effective tax rate*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan (baik positif maupun negatif) antara variabel bebas: kepemilikan saham asing, kepemilikan saham institusional, jumlah dewan komisaris independen, kompetensi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kompetensi komite audit, serta variabel kontrol leverage, dan ROA terhadap *tax avoidance*.

Dalam pengujian ini dilakukan uji satu sisi dengan derajat kebebasan sebesar 5%, sedangkan jumlah sampel data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 204 tahun 2009-2014. Hasil pengujian secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat *cash effective tax rate* dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: Uji Statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,190	,087		2,185	,030
1	Foreign	,078	,027	,214	2,858	,005*
	Institusi_B	,065	,053	,101	1,223	,223
	KI	,054	,055	,067	,990	,323
	Ekspert_KI	,043	,023	,150	1,902	,059**
	KA	-,005	,019	-,019	-,276	,783
	Ekspert_KA	-,033	,039	-,071	-,830	,408
	LEV	-,032	,012	-,192	-2,766	,006**
	ROA	-,025	,090	-,020	-,276	,783

a. Dependent Variable: CETR

*Signifikan pada α 5%

** Signifikan pada α 10%

Sumber: Data sekunder diolah

Pembahasan Hasil Analisis *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari uji signifikansi regresi dengan menggunakan program SPSS versi 16 untuk pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* seperti digambarkan dalam tabel Uji Statistik t, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Foreign atau kepemilikan saham asing. Dalam analisis data yang dihasilkan dengan signifikansi 0,05 dengan beta positif 0,078. Hasil ini menunjukkan menunjukkan menerima hipotesis H.1.a, bahwa variabel kepemilikan saham asing berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Artinya ketika kepemilikan saham

asing naik satu satuan, maka nilai CETR naik sebesar 0,078. Hasil ini sejalan dengan penelitian Salihu, et al., 2014 yang menyatakan kepemilikan asing sebagai salah satu penentu adanya *tax avoidance*.

Ins-B atau kepemilikan saham institusi. Dalam analisis data yang dihasilkan dengan signifikansi kurang dari 0,05 ($P > t$ 0,223 > 0,05) dengan beta positif 0,065. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan, maka H.1.b, ditolak. Berarti ketika kepemilikan saham institusional bertambah ataupun berkurang tidak mempengaruhi CETR atau tidak merubah tarif pajak yang harus dibayar. Logika hasil analisis ini, bahwa kepemilikan institusional fokus pada stabilitas perusahaan dan lebih memilih jalur aman dalam perjalanan investasinya. Hal ini disebabkan investor institusional tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Jensen dan Meckling, 1976, yang menyatakan keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Ind-Board atau prosentase Dewan Komisaris Independen. Dalam analisis data yang dihasilkan dengan signifikansi kurang dari 0,05 ($P < t$ 0,323 < 0,05) dengan beta positif 0,054. Berarti variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CETR. Hasil ini menyatakan bahwa H.2.a, ditolak. Dalam penelitian ini variabel prosentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, maksudnya berapapun jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi seberapa pun tarif pajak yang dibayar. Dewan komisaris melakukan pengawasan tetapi tidak pada setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Armstrong, et. Al., 2014 menemukan bukti bahwa kecanggihan sistem keuangan dan komisaris independen bertentangan dengan penelitian Winata (2014) yang menyatakan komposisi dewan komisaris independen berpengaruh dengan tingkat signifikan 10% terhadap *tax avoidance*.

Namun untuk Kompetensi dewan komisaris independen dalam bidang keuangan dan pajak (*expert_KI*), menunjukkan berpengaruh positif signifikan (0,059), pada tingkat signifikansi 0,1 dengan beta positif 0,043, artinya semakin dewan komisaris independen mempunyai kompetensi pada bidang keuangan dan pajak, maka semakin meningkat *cash effective tax rate* atau tingkat tarif pajak yang dibayar dengan kata lain mencegah penghindaran pajak.

Variabel Komite Audit (KA). Dalam analisis data yang dihasilkan dengan signifikansi lebih dari 0,05 ($P > t$ 0,783 > 0,05) dengan beta negatif 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan, maka H.3.a, ditolak. Berarti ketika jumlah komite audit bertambah ataupun berkurang tidak mempengaruhi CETR atau tidak merubah tarif pajak yang harus dibayar.

Begitu juga untuk *expert_KA* atau kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05 ($P > t$ 0,408 > 0,05) dengan beta negatif 0,033. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan, maka H.3.b, ditolak. Berarti ketika jumlah komite audit bertambah ataupun berkurang tidak mempengaruhi CETR atau tidak merubah tarif pajak yang harus dibayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Motivasi atas minimalisasi beban pajak dapat diperoleh dari berbagai faktor dalam internal perusahaan dan aspek dalam pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini memodifikasi dari penelitian Salihu et.,al. (2015), Koverman (2019) mengenai pengaruh kepemilikan perusahaan, *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Untuk mengukur *tax avoidance* yang mudah dimengerti, penelitian ini menggunakan ukuran *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR* atau CETR) perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah prosentase kepemilikan asing (*foreign*) dengan signifikan pada α 5% dan kompetensi dewan komisaris independen dengan signifikan pada α 5%.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan hasil, yang menunjukkan koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R Square* yakni sebesar 19,8%, yang menunjukkan bahwa hanya sebesar 19,8% dari adanya praktek *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance* (proksi prosentase dewan komisaris independen), dan variabel karakteristik eksekutif (proksi CEO *founder*) sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Penelitian ini tidak dapat maksimal menangkap fenomena dalam proksi variabel *corporate governance* dan variabel karakteristik eksekutif. Mungkin dikarenakan data yang di-*outlier* terlalu besar sehingga mempengaruhi hasil dalam pengujian statistik.

Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel menggunakan data tidak hanya perusahaan manufaktur atau semua kategori perusahaan yang terdaftar agar sampel yang digunakan dapat lebih banyak, serta data dan hasil dapat dibedakan berdasarkan kelompok sektor bisnisnya. Bahkan mungkin dapat menambahkan rentang waktu yang lebih panjang, agar terlihat perbedaan motivasi atas *tax avoidance* sebagai akibat dari perubahan peraturan perpajakan. Misalnya dengan melakukan penelitian dengan mengambil data rentang waktu sebelum terjadi masa pandemic Covid 19, saat terjadi pandemic Covid 19, dan sesudah pandemic Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, C. S., J. L., Blouin, A. D. Jagolinzer, D. F. Larcker. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 60, pp. 1–17.
- Andriyanto, T dan Marlina, A. 2021. Pengaruh struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tax Avoidance di Indonesia dengan Corporate Dovernance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.3, No.1, 178-196.
- Annisa, N. A., L. Kurniasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8, No. 2, hal. 95-189.
- Anthony. R. N., dan V. Govindarajan. 2009. Management Control System (Buku 2). *Mc. Graw Hill. Penerbit Salemba Empat*.
- Desai, M. A., dan D. Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, pp. 145-179.
- Desai, M. A., A. Dyck, L. Zingales. 2007. Theft and Taxes. *Journal of Financial economics*, Vol.84, pp. 591-623.
- Dyreg, S. D., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, pp. 1163-1189.
- Jensen, Michael C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. <http://papers.ssrn.com>.
- Kapil, Sheeba dan Mishra, Rakesh. 2019. Corporate Governance and Firm Performance in Emerging Markets: Evidence from India. *Theoretical Economics Letters*, Vol.9 No.6.
- Kovermann, J., Velte, P. 2019. The impact of corporate governance on corporate tax avoidance-A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 36, 100270.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-41/PM/2003
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-103/MBU/2002.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, www.governance-indonesia.or.id, diakses 16 Januari 2016.
- Richardson, G., dan R. Lanis. 2007. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 87, No. 3, pp. 975–1003.
- Salihu, I. A., Sheikh Obid, S. N., Anuar, H. A. 2014. Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, pp. 150 – 160.
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak. Salemba Empat*, Edisi Keempat, ISBN. 978-979-691-461-6.

- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitas dan RND. *Bandung Alfabet*.
- S. R., Soemarso. 2007. Perpajakan (Pendekatan Komprehensif). *Salemba Empat*, ISBN. 978-979-691-380-0.
- Swingly, C., I Made. S. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udhayana*, Vol. 10.1, pp. 47-62.
- Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>. Diunduh 31 Agustus 2022.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, pp. 1-11.